FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Dewi Risna Zega, Rocyke I.J. Pangkey, Meidy Kantohe
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia
e-mail: risna4275@gmail.com,pangkeyrij@gmail.com,meidysskantohe@unima.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis deskriptif, pendekatan kualitatif berdasarkan laporan realisasi pendapatan dari tahun 2018 hingga 2020, dan wawancara digunakan sebagai teknik penelitian. Analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, dan analisis rasio keuangan adalah contoh pendekatan analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dari tahun 2018 hingga 2020 memiliki kriteria kemampuan buruk sebesar 98,42 persen, belum mencapai 100 persen, dan memiliki pertumbuhan pendapatan keseluruhan sebesar -1,24 persen. Hasil analisis rasio derajat desentralisasi masih sangat kurang baik yaitu 7,63 persen dan analisis rasio ketergantungan adalah 77,16 persen, menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih sangat bergantung. Pemeriksaan rasio efektivitas keseluruhan Pendapatan Asli Daeah termasuk dalam kriteria efektif untuk transfer uang dari pusat. Wawancara sampai pada kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak, retribusi daerah, dan masalah Covid-19 adalah alasan utama realisasi pendapatan tidak memenuhi tujuan yang direncanakan.
Kata Kunci: Analisis Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran

Abstract: *All regional rights that were recognized as enhancing net worth during the applicable fiscal year period are considered regional revenues. This research aims to evaluate the Regional Finance and Asset Management Agency of Minahasa Regency's revenue performance. Descriptive analysis, a qualitative approach based on revenue realization reports from 2018 to 2020, and interviews were utilized as the study techniques. Revenue variance analysis, revenue growth analysis, and financial ratio analysis are all examples of data analysis approaches. The study's findings indicated that the Minahasa Regency Regional Government's revenue performance from 2018 to 2020 had poor ability criteria of 98.42 percent, had not reached 100 percent, and had overall revenue growth of -1.24 percent. The results of the ratio analysis of the degree of decentralization are still very poor at 7.63 percent and that the dependency ratio analysis is 77.16 percent, indicating that the region is still highly dependent. The examination of Daeah's Original Revenue's overall effectiveness ratio is included in the effective criterion for transfers of money from the center. The interview came to the conclusion that the lack of public knowledge of tax payments, local levies, and the Covid-19 issue were the main reasons revenue realization fell short of the planned objective.*
Keywords: *Performance Analysis, Budget Realization Report*

PENDAHULUAN

Lembaga teknis daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa. Salah satu tanggung jawab BPKAD adalah mengelola pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah, di antara tugas keuangan pemerintah lainnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan perkembangan dalam penyusunan kinerja pendapatan daerah, dan hal tersebut dilakukan dengan tidak mengabaikan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

pengukuran kinerja anggaran secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran biaya standar.

Pemerintah Kabupaten Minahasa juga mengalami kesulitan dengan pendanaan dan pembangunan yang lebih besar berasal dari sumber daerah. Kabupaten Minahasa dipengaruhi oleh situasi di mana realisasi pendapatan anggaran/target tahunan secara konsisten kurang berhasil. ketika jumlah uang yang sebenarnya direalisasikan secara konsisten di bawah tujuan yang direncanakan. Pemerintah Minahasa telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, termasuk memperluas cakupan pajak dan retribusi, merampingkan transfer pusat dan pendapatan hibah, dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya masih ada target yang belum tercapai. Studi ini menganalisis data time series dari tahun 2018 hingga 2020 untuk menganalisis kinerja pendapatan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Minahasa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2018	1.276.760.515.479	1.267.974.996.960	99.31
2019	1.338.561.277.934	1.300.024.724.183	97,12
2020	1.241.547.050.857	1.227.192.314.256	98.84

Sumber : Laporan Realisasi Daerah BPKAD Kabupaten Minahasa

Perkembangan realisasi pendapatan selama periode tiga tahun Kabupaten Minahasa menunjukkan bagaimana anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan di BPKAD Kabupaten Minahasa tahun 2018–2020, di mana rasio anggaran terhadap realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil tahun 2018–2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan secara konsisten menurun, jauh dari tujuan yang dianggarkan, dan realisasi pendapatan tidak dikelola dengan baik. Kesimpulan: Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Minahasa 2018–2020 dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat masih dibawah standar.

Otonomi daerah dilaksanakan agar pemerintah fokus memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik mencakup, antara lain, penyediaan layanan publik yang berkualitas tinggi (Adisasmita, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabarkan Kewenangan Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wahana pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak sah pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang berlaku merupakan pengertian lain dari pendapatan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terdiri dari berbagai sumber pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu unsur pokok suatu daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah itu sendiri sebagai bentuk desentralisasi, diperlukan adanya pendapatan asli daerah.

Pendapatan transfer ialah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Pendapatan dari transfer antar daerah dapat berasal dari bantuan keuangan atau pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil adalah dana yang diperoleh dari pendapatan daerah tertentu, sesuai dengan aturan dan peraturan, didistribusikan ke daerah lain sesuai dengan proporsi tertentu. Semua pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Kinerja Pendapatan. seperti penelitian Lampa & Sabijono (2016) di Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang dilihat dari analisis varians pendapatan belum memenuhi atau melampaui tujuan anggaran. Meski sempat turun, pertumbuhan pendapatan mampu kembali normal sehingga kinerja pertumbuhan pendapatan cukup baik. Bila dilihat derajat desentralisasi dari perspektif income performance financial ratio masih rendah dan cenderung terus menurun; untuk rasio ketergantungan, tetap bergantung pada pemerintah pusat dan untuk analisis efektivitas pendapatan asli daerah dinilai sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya.

Berdasarkan hasil penelitian Saputra, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2018), Kabupaten Jembrana Provinsi Bali termasuk dalam kategori baik jika dilihat dari varians/selisih pendapatan, kategori sangat kurang baik jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi, dan kategori rendah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan instruktif. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategori pertumbuhannya positif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganilis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Minahasa menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada Maret 2023.

Penulis berfokus pada bagian laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2018-2020. Untuk menjawab permasalahan pendapatan di BPKAD Kabupaten Minahasa dengan melakukan wawancara dan untuk menganalisis pendapatan dengan menggunakan perhitungan seperti analisis variansi, analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan yang terdiri dari analisis derajat desentralisasi, analisis ketergantungan, dan analisis efektivitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Varian Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan menghitung selisih antara pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatan. Biasanya selisih anggaran tersebut telah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Varian Pendapatan} = \textbf{Realisasi Anggaran} - \textbf{Anggaran Pendapatan}$$

$$\textbf{Persentase Varian Pendapatan} = \frac{\textbf{Realisasi Tahun t}}{\textbf{Anggaran Tahun t}} \times 100\%$$

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Tabel 2. Analisis Varians Pendapatan Kabupaten Minahasa

Tahun	Realisasi	Anggaran	Perbedaan	Persentase (%)	Kriteria Kemampuan
2018	1.267.974.996.960	1.276.760.515.479	-8.785.518.519	99.31	Tidak baik
2019	1.300.024.724.183	1.338.561.277.934	-38.536.553.751	97,12	Tidak baik
2020	1.227.192.314.256	1.241.547.050.857	-14.354.736.601	98.84	Tidak baik
Rata-rata 98,42					

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Minahasa

Pendapatan rata-rata untuk studi tersebut, menurut Tabel 2, hanya 98,42 persen, yang menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa belum mencapai targetnya. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018–2020 memiliki kriteria kemampuan kurang baik dimana selisih antara realisasi dan rata-rata anggarannya negatif atau realisasinya lebih kecil dari anggarannya, sesuai temuan analisis varians, Mahmudi (2016) menegaskan bahwa kriteria pengukuranl untuk analisis variansi anggaran pendapatan adalah sangat baik jika realisasikan pendapatan > pendapatan yang dianggarkan, dan kurang baik jika realisasi pendapatan < anggaran pendapatan.

Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa keseluruhan target anggaran untuk periode 2018–2020 tidak mencapai target, meskipun selisihnya kecil, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa cukup baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa harus lebih memperhatikan pendapatan dan mencari solusi terbaik agar target pendapatan bisa tercapai. Untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah harus memperhatikan kembali sumber-sumber pendapatan tersebut.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa peningkatan atau penurunan kinerja pendapatan selama periode waktu tertentu yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\textbf{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\textbf{Tahun Pendapatan t} - \textbf{Tahun Pendapatan t}-1}{\textbf{Pendapatan Tahun t}} \textbf{ x 100\%}$$

Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Tahun	Penghasilan	Pertumbuhan	Persentase (%)
2018	1.267.974.996.960	-8.104.818.244	-0,64
2019	1.300.024.724.183	32.049.727.223	2.53
2020	1.227.192.314.256	-72.832.409.927	-5.60
Rata-rata			**-1,24**

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Minahasa

Berdasarkan Tabel 3, pertumbuhan pendapatan Kabupaten Minahasa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rata-rata memiliki pertumbuhan pendapatan negatif atau kurang baik sebesar 1,24 persen. Sampai dengan tahun 2018, pemeriksaan pertumbuhan pendapatan memberikan hasil negatif sebesar -8.104.818.244 dengan persentase penurunan sebesar -0,64 persen. Pertumbuhan pendapatan tahun 2019 cukup baik, memilik hasil yang positif sebesar -72.832.409.927 dan persentase penurunan drastis sebesar -5,60 persen pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

kembali menurun. Kecuali tahun 2019, ketika pertumbuhan pendapatan cenderung meningkat, statistik pertumbuhan pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020 kurang memuaskan.

3. Analisis Rasio Keuangan

A. Analisis Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara total pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PendapatanAsli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4. Analisis Rasio Tingkat Desentralisasi di Kabupaten Minahasa

Tahun	BANTALAN	Jumlah pemasukan	Rasio Derajat Terdesentralisasi	Kriteria Kemampuan
2018	94.590.405.094	1.267.974.996.960	7,46%	Sangat kurang
2019	99.406.903.272	1.300.024.724.183	7,65%	Sangat kurang
2020	95.615.427.961	1.227.192.314.256	7,79%	Sangat kurang
Rata-rata			**7,63%**	

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Minahasa

Hasil analisis derajat desentralisasi Kabupaten Minahasa pada tahun 2018 hingga 2020, dimana rata-rata derajat desentralisasi adalah 7,63 persen. Karena derajat desentralisasi yang baik harus terjadi pada skala kriteria rata-rata >50 persen, hasil ini masih jauh dari memuaskan. Dengan persentase total 7,79 persen dan standar kemampuan yang sangat kurang baik, tahun 2020 memiliki rasio persentase desentralisasi tinggi di antara tahun sebelumnya. Dengan kriteria derajat desentralisasi sangat kurang baik pada tahun 2018 persentasenya sebesar 7,46 persen; tahun ini, persentasenya merupakan tingkat rasio desentralisasi yang paling rendah. Hasil rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Minahasa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 7,63 persen menunjukkan bahwa skalanya sangat kurang baik atau tingkat desentralisasi sangat rendah.

B. Analisis Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini diperoleh dari pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Jumlah pemasukan}} \text{ X } 100\%$$

Tabel 5. Analisis Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun	Pendapatan Transfer	Jumlah pemasukan	Rasio Ketergantungan Daerah	Kriteria Kemampuan
2018	911.587.605.152	1.267.974.996.960	71,89%	Sangat tinggi
2019	906.083.472.525	1.300.024.724.183	69,70%	Sangat tinggi
2020	1.103.293.279.189	1.227.192.314.256	89,90%	Sangat tinggi
Rata-rata			**77,16%**	

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Minahasa

Tabel 5. menunjukkan hasil kajian dengan analisis ketergantungan wilayah pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2020 dimana persentase rata-rata rasio ketergantungan mencapai 77,16%. Rasio ketergantungan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 89,90% dan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2019 sebesar 69,70%. Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan pendapatan daerah dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Sebagian besar dari total pendapatan daerah masih berasal dari pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memperoleh pendapatan daerah.

C. Analisis Rasio Efektivitas Penerimaan

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas pendapatan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\textbf{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\textbf{Realisasi Penerimaan PAD}}{\textbf{Anggaran Pendapatan PAD}} \textbf{ X 100\%}$$

Tabel 6. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria Kemampuan
2018	94.590.405.094	99.198.305.032	95,35%	Efektif
2019	99.406.903.272	107.465.799.926	92,50%	Efektif
2020	95.615.427.961	102.667.115.914	93,13%	Efektif
Rata-rata			**93,66%**	

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kabupaten Minahasa

Tabel 6. Menunjukkan hasil analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa tahun 2018-2020 dimana rata-rata efektivitasnya adalah 93,66%. Rasio efektivitas PAD terbesar diperoleh dari tahun 2018 sebesar 95,35% dan untuk rasio efektivitas terendah pada tahun 2019 sebesar 92,50%. Dari analisis tersebut terlihat bahwa efektivitas pendapatan Kabupaten Minahasa tergolong efektif karena rata-rata efektivitas pendapatan sebesar 97,03%. Sesuai dengan skala kriteria efektivitas pendapatan, dimana jika rata-rata rasio efektivitas > 100% menunjukkan rasio efektivitas sangat efektif dan jika berada pada 90%-100% maka rasio efektivitas pendapatan tergolong efektif. .

Hasil Wawancara (Wawancara)

Penulis akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan metode penelitian. Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Minahasa dan Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan menjadi narasumber penelitian. Berikut tabel penjelasan informan yang diperlukan untuk kebenaran data informan:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Tabel 7. Daftar Data Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Posisi
1	Refly J.Igir, SE	Pria	44	Kepala Bagian Anggaran
2	Jenghis Supit, SE	Pria	45	Kepala Akuntansi dan Pelaporan

Sumber : BPKAD Kabupaten Minahasa

Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, observasi dari informan yaitu kepala anggaran dan kepala bidang akuntansi, akan dipaparkan hasil wawancara mengenai analisis kinerja pendapatan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil Kinerja Pendapatan Asli Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dengan menggunakan Analisis Varians Pendapatan Tahun 2018–2020 memilik kriteria kemampuan kurang baik. Hal ini disebabkan realisasinya berturut-turut tidak mencapai target yang dianggarkan.
2. Berdasarkan hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,24 persen. Hanya ditahun 2019 yang bernilai positif. Berdasarkan hasil kinerja pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa yang ditentukan dengan analisis rasio keuangan, derajat desentralisasi pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2020 masih sangat kurang baik sebesar 7,63 persen. Hal ini disebabkan keseluruhan hasil analisis yang masih berada di bawah 20%. Hasil Analisis Rasio Ketergantungan 2018–2020 mengukur kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang secara keseluruhan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan keseluruhan rata-rata rasio ketergantungan yaitu sebesar 77,16 persen. Hasil Analisis Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018–2020 secara keseluruhan tergolong efektif. Hal ini karena sebagian besar tahun anggaran memiliki kriteria kemampuan yang efektif dimana rasio efektifitasnya sebesar 93,66%.
4. Hasil penelitian mengenai kinerja pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak sesuai dengan target yang dianggarkan. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang pembayaran pajak dan retribusi daerah. Permasalahan Covid-19 juga menjadi penghambat pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2020). Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agnika, M., & SS Putra. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 1(3), 493-503.

Astuti, LD, & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ilmu dan Penelitian Akuntansi (JIRA), 8(10).

Fathiyah, IN, BN Pasla, & MA Fahmi Rasid. (2022). Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kapasitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Prajaiswara, 3(1).

Baik, DS (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016. Tesis. Universitas

Islam Indonesia. Yogyakarta.

Gunawan, SE (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. Parsimonia-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(3), 329-345.

Hanifa, R., & V. Amalia. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. Rahmaniyah Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1), 34-48.

Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, dan Dak terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi, 14(1), 85–100.

Indrianto, N., & Supomo. (2009). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Kusumadewi, WN, & V.Ilat. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 5(1), 1355-1370.

Lampa, L., & H. Sabijono. (2016). Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Mahmudi. (2016). Analisis Varians Pendapatan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan. (On line). (http://download.garuda.ristedikti.go.id, diakses 3 Juni 2023).

Mahsun. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mandey, KR, & TO Rotinsulu. (2015). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Terkait dengan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(3).

Mardiasmo. (2002). akuntansi sektor publik. Yogyakarta.

Meiliya Dona, E., & VA Lestari. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. Saldo: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 5(2), 135-144.

Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 10-15.

Moleong, LJ (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi ke-24). Pemuda Rosdakarya.

Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 2(1), 104-122.

Nirvana, E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2018. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 1(2), 153-164.

Oke, KK (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(2). Isssn: 2503-3093.

Pinontoan, TS, MSS Kantohe, & F. Karundeng. (2023). Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 4(1), 187-195.

Poyoh, CM, S. Murni, & JE Tulung. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Lembaga Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(2).

Priyono, N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Tahun 2001-2010). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 1(2), 13-26.

Rohita, SF (2021). Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto (Studi Kasus

Pada BPPKA Kota Mojokerto). Disertasi doktoral. STIE PGRI Dewantara Jombang.

Rosyidah, N., & S. Santoso. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun 2015-2019. Kajian Akuntansi Surakarta, 2(2), 1-7.

Sampow, R., & R. Pangkey. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Lembaga Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Bitung. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 3(2), 261-271.

Saputra, SC, IW Suwendra, & F. Yudiaatmaja. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(2), 136-145.

Sari, P., & A. Baku. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Jurnal Manajemen Mirai, 7(2), 395-406.

Setiani, T., & RN Madila. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. Jurnal Akuntansi, 12(02), 103-11.

Siagian, DIB (2021). Analisis Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Tyas, FAS, & U. Rani. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. Transekonomi: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 2(3), 39-48.

Zebua, DTS, J. Manaroinsong, & F. Moroki. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 3 (1), 1-10.